

# ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS HARUN MASIKU PADA MAJALAH TEMPO

Wiwid Adiyanto dan Ahmad Khairul Nuzuli  
Universitas Amikom Yogyakarta  
wiwidadiyanto@amikom.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini merupakan kajian teks dengan analisis framing Robert N Entman dengan Teori *Agenda Setting* untuk menggambarkan proses seleksi dan realitas media. Objek penelitian ini adalah laporan utama majalah Tempo edisi 20-26 Januari 2020 terkait kasus yang melibatkan Harun Masiku. Hasil penelitian ini memperlihatkan Tempo cenderung mengemas berita yang menyorot pemerintah tidak serius dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Tempo menyikapi kasus suap yang menyorot Harun Masiku sebagai permasalahan kekuasaan dari partai PDIP yang merambah pada beberapa institusi terkait. Harun Masiku dilihat hanya sebagai salah satu aktor kekuasaan yang sebenarnya ada pada kekuasaan terstruktur yang saling berkaitan, termasuk kaitannya dengan presiden dan DPR. Tempo memposisikan KPK secara institusi menjadi korban dari kekuasaan luar yang masuk dalam institusi KPK yang seharusnya independen. Pada akhirnya Tempo menyorot rekomendasi agar kasus Harun Masiku diusut tuntas, termasuk penindakan pada aktor lain yang terkait. Tempo melihat kekuasaan tersebut sebagai strategi yang dirancang secara sistematis yang dimulai dari perubahan Undang-Undang terkait KPK yang justru melemahkan KPK.

Kata Kunci: Harun Masiku, PDIP, KPK, Tempo, Framing

## Abstract

*This research is a text study with Robert N Entman's framing analysis with Agenda Setting theory to describe the selection process and media reality. The object of this research is the main report of the 20-26 January 2020 edition of Tempo magazine regarding the case involving Harun Masiku. The results of this research show that Tempo tends to publish news that highlights that the government is not serious in eradicating corruption, collusion and nepotism (KKN) in Indonesia. Tempo is addressing the bribery case that highlighted Harun Masiku as a problem of power from the PDIP party which has penetrated several related*

*institutions. Harun Masiku is seen only as one of those power actors who actually have structured powers that are interrelated, including those with the president and the DPR. Tempo has positioned the Corruption Eradication Commission as an institution as a victim of outside powers that enter the KPK institution, which should have been independent. In the end, Tempo highlighted a recommendation that the Harun Masiku case be thoroughly investigated, including the prosecution of other related actors. Tempo sees this power as a systematically designed strategy that starts with the amendment of the Law on the Corruption Eradication Commission which actually weakens the KPK.*

*Keywords: Harun Masiku, PDIP, KPK, Tempo, Framing*

## 1. Pendahuluan

Harun Masiku menjadi nama yang populer di media di Indonesia pada awal tahun 2020. Harun Masiku diduga menyuap Wahyu Setiawan yang merupakan mantan komisioner KPU. Situasi itu terkait dengan meninggalnya Nazarudin Kiemas yang berdampak pada adanya peralihan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal tersebut memang sudah diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Dari data yang ada, perolehan suara terbanyak setelah Nazarudin adalah Riezky Aprilia di Sumatera Selatan (Hariyanto, 2020). Kondisi itu berpotensi membuat cela kecurangan, diduga Harun Masiku memanfaatkan kondisi dengan menyuap Wahyu agar Harun bisa menggantikan Nazarudin. Jumlah suap yang diberitakan di portal pemberitaan [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) mencapai 400 juta (Ryn, 2020). Kompas melalui portal pemberitaan onlinenya menyatakan bahwa, Harun Masiku telah menyuap dan diterima oleh Wahyu Setiawan dengan uang senilai 600 juta serta dana lainnya yang identitasnya belum diketahui. Diduga Wahyu mematok uang suap tersebut sebesar 900 juta untuk melancarkan rencananya (Ramadhan, 2020). Kasus suap tersebut semakin menjadi perhatian media ketika Harun Masiku belum bisa dipastikan keberadaannya.

Media, pemerintah, maupun masyarakat belum menemukan keberadaan Harun Masiku sampai pada akhir bulan Februari 2020. Sedangkan kasus Harun

Masiku mencuat pada awal tahun 2020. Harun Masiku sempat dikabarkan pergi ke Singapura, namun kembalinya Harun Masiku masih menjadi polemik di bulan Februari. Media Tempo memberitakan melalui portal media *onlinenya* bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoly melepas jabatan Rony F. Sompie dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi. Hal tersebut terjadi setelah Rony mengaku bahwa Harun Masiku telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Temuannya itu tidak segera dipublikasikan dengan alasan bahwa ada keterlambatan sistem informasi di keimigrasian bandara (Tempo, 2020). Tim penelusuran media Tempo menyatakan bahwa Harun Masiku ada di Jakarta selama operasi pencarian itu berlangsung (Trianita *et al.*, 2020, p. 28). Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga bahwa Harun Masiku melakukan suap secara sistematis, yang artinya Harun Masiku tidak sendiri dalam melancarkan aksinya. Ada beberapa nama yang diduga terlibat seperti Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto dan pengacara PDIP Donny Tri Istiqomah (Aji, 2020).

Pemberitaan dugaan suap Harun Masiku tidak terlepas dari sorotan media. Media merupakan agen konstruksi suatu peristiwa yang bermuara pada publikasi demi kebutuhan informasi masyarakat (Eriyanto, 2011, p. 25). Hal tersebut berarti informasi kasus Harun Masiku tidak terlepas dari sikap media yang membingkai kasus tersebut. McLuhan menyatakan bahwa media adalah perpanjangan indera manusia (Baran and Davis, 2012, p. 273). Portal berita Tempo.co merupakan media yang merupakan perpanjangan tangan antara realitas, informasi yang dikonstruksikan media, yang bermuara pada informasi yang diterima masyarakat. Media yang seharusnya bebas nilai terkadang menjadi sarat akan nilai. Media berpotensi menggiring opini publik tentang suatu fenomena. Media yang merupakan perpanjangan indera masyarakat memainkan peran penting dalam *supplay* informasi kepada publik. Media sebagai pilar keempat demokrasi tidak terlepas dari perannya sebagai *watchdog*. Dalam negara demokrasi, masyarakat bisa ikut memantau kerja pemerintah dan

problematikanya yang salah satunya melalui media. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kondisi negara yang sebenarnya, termasuk dalam dugaan kasus suap Harun Masiku. Pemerintah, media dan masyarakat dituntut untuk bersama-sama memerangi korupsi, suap dan sejenisnya untuk Indonesia yang lebih baik. Pers memiliki fungsi sebagai jembatan bagi masyarakat kepada pemerintah, begitu juga sebaliknya. Pers melalui media diberikan kepercayaan untuk menginformasikan kondisi yang sebenarnya pada masyarakat, termasuk tentang kasus Harun Masiku. Sebaliknya, pemerintah juga perlu peran media untuk mempublikasikan kebijakan (Musman and Mulyadi, 2017, p. 80).

Kasus Harun Masiku mendapat perhatian terlebih bagi KPK dan media serta masyarakat yang memantaunya melalui media. Kasus suap ataupun korupsi di Indonesia sudah dalam level yang memprihatinkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tentang kasus korupsi tertinggi selama periode 2004-2019 adalah ditahun 2018 (Garnesia, 2019). KPK menunjukkan keberhasilannya dalam proses penegakan hukum yang meningkat dari tahun 2017 sebesar 62,27% dan tahun 2018 menjadi 71,03%. Selain itu, keberhasilannya juga dimuat dalam laporannya bahwa selama 2018, KPK berhasil menjaring 121 orang dari 30 Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tentu saja pencapaian itu merupakan kerjasama dari berbagai pihak. Benturan kepentingan dalam pendanaan Pilkada 2018 juga menjadi permasalahan yang belum tuntas. Laporan KPK menyatakan bahwa, mahar yang harus dibayar oleh calon kepala daerah adalah 50 juta sampai 500 juta. Jumlah tersebut bergantung pada besarnya nama partai, semakin besar partai itu maka semakin tinggi maharnya (KPK, 2019).

Majalah Tempo pernah membuat *cover* yang menyandingkan presiden Jokowi dengan sosok bayangan berhidung panjang dengan tulisan "janji tinggal janji". *Cover* itu sempat menjadi hal yang kontroversial dengan makna yang dinilai ambigu bagi pendukung Jokowi. Namun penelitian dari Marlia dan Saifullah (Marlia and Saifullah, 2020) menjelaskan bahwa penyandingan Jokowi dan bayangan berhidung panjang yang diidentikan dengan cerita dongeng

Pinokio, tidak serta mutlak mensejajarkan Jokowi dengan kebohongan. Kebohongan atau tidak bohong sangat relatif ditinjau dari dukungan pro atau kontra terhadap Jokowi.

Kasus Harun Masiku mengingatkan pada fenomena cicak *versus* buaya pada tahun 2009. Saat itu KPK berhasil menyadap telfon Susno Duadji selaku Kepala Badan Reserse Kriminal Polri terkait kasus korupsi. Cicak pada awalnya merupakan umpatan dari Susno Duadji pada KPK terkait penyadapannya. Fenomena membalik, cicak yang tadinya merupakan umpatan, menjadi merupakan simbol dukungan masyarakat terhadap KPK terkait menuju Indonesia yang bersih dari Korupsi. Cicak diganti dengan singkatan Cinta Indonesia Cinta KPK. Sedangkan buaya yang dimaksud Susno Duadji menyimbolkan kepolisisan (Lim, 2014, p. 38). Hal tersebut memiliki kesamaan situasi dimana KPK melawan Harun Masiku yang merupakan anggota dari partai pemenang pemilu.

Pada bulan Desember 2019, Tempo mempublikasi suatu artikel yang menunjukkan bahwa KPK telah dilemahkan oleh revisi Undang-Undang dalam waktu yang singkat yang melibatkan oligarki Dewan Perwakilan Rakyat dari partai pemenang. Pelemahan tersebut dinilai membuat KPK tidak dapat bergerak lebih efektif (Tempo, 2019). Mekanisme KPK yang lama dalam pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan hanya ada dua tahap. Pertama permohonan izin penggeledahan kepada pimpinan KPK. Kedua Pimpinan KPK menganalisis dan memberikan keputusan paling lama 24 jam. Revisi UU membuat mekanisme penggeledahan oleh KPK semakin panjang, yaitu sampai 5 tahap yang melibatkan dewan pengawas untuk melakukan penggeledahan (Trianita *et al.*, 2020, p. 30). Cover majalah Tempo edisi 20-26 Januari 2020 juga menampilkan pernyataan "cicak jadi buaya".

Pemberitaan media terkait dengan korupsi yang terkait dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah ada lebih dulu sebelum adanya kasus dugaan suap Harun Masiku. Ananda (2019) meneliti tentang framing media online Detik.com terkait korupsi massal yang terjadi di DPRD kota Malang yang

menyangkut partai besar tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Detik.com menggunakan pendekatan data dan sudut pandang KPK juga pengamat korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW). Korupsi massal yang dilakukan 9 anggota DPRD kota Malang memberikan dampak negatif pada partai itu. Penelitian tersebut menarik kesimpulan bahwa sikap media Detik.com cenderung netral namun masih condong pada dukungannya untuk memberantas korupsi.

Jaya dan Syam (2019) juga meneliti pemberitaan media terkait korupsi di Indonesia, pada kasus korupsi yang dilakukan Setya Novanto pada portal berita Cnnindonesia.com dan Viva.co.id. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan sudut pandang pemberitaan antara Cnnindonesia.com dengan Viva.co.id. Cnnindonesia.com melihat kasus tersebut bukan hanya permasalahan hukum, namun media tersebut menggiring opini bahwa korupsi e-KTP adalah kejahatan yang sistematis dan bukan hanya Setya Novanto yang terlibat. Viva.co.id cenderung melihat kasus tersebut adalah murni pelanggaran hukum. Viva.co.id fokus pada penanganan hukum Setya Novanto dengan fakta-fakta di lapangan.

Dari penelitian yang sudah ada, artikel ini berusaha membahas sisi yang belum dibahas dari penelitian lain terkait pemberitaan korupsi dan suap. Artikel ini akan membahas bagaimana media mampu membentuk cara pandang pembacanya. Media Tempo menjadi bahan kajian karena belum adanya penelitian tentang sudut pandang pemberitaan mengenai Harun Masiku di media Tempo. Tempo juga memiliki aplikasi yang mempermudah pembacanya untuk mendapatkan informasi melalui aplikasi Tempo di gawai. Pemberitaan yang dianggap kontroversial membuat aplikasi tersebut mengalami penurunan rating. Penyandingan presiden Jokowi dan sosok bayangan berhidung panjang berhasil membuat aplikasi Tempo mengalami penurunan rating secara cepat. Sampai pada 10 Maret 2020, aplikasi Tempo disistem operasional IOS tercatat 1,7 dari 5. Menariknya, media Tempo seakan tidak kapok dan bisa bertahan

sampai saat ini (Zaenudin, 2019). Tidak hanya aplikasi, tempo juga memiliki beberapa wadah publikasi yaitu koran Tempo, majalah Tempo yang berbentuk fisik maupun digital, serta portal berita Tempo.co.

## 2. Tujuan Penelitian

Pada edisi 20-26 Januari 2020, majalah Tempo menerbitkan pemberitaan yang cenderung lebih fokus pada isu kasus Harun Masiku dan KPK dengan cover bertuliskan "cicak jadi buaya". Kasus Harun Masiku menjadi laporan utama pada edisi tersebut. Media massa yang seharusnya netral dari korupsi atau kolusi, yang seharusnya tidak terjadi merupakan *entry point* dalam permasalahan di penelitian ini. Bagaimana Tempo menyikapi kasus dugaan kolusi yang dilakukan Harun Masiku ditengah krisis kepercayaan bagi sebagian masyarakat terhadap pemberitaan Tempo. Penelitian ini fokus pada pemberitaan di Majalah Tempo edisi 20-26 Januari 2020 terkait dengan berita kasus dugaan suap Harun Masiku untuk mendeskripsikan sikap media Tempo terkait kasus Harun Masiku. Majalah dipilih menjadi objek penelitian karena pemberitaan yang ada pada majalah Tempo edisi tersebut dianggap memiliki penyajian yang lebih lengkap, mendalam, dan tidak terputus-putus dari pada wadah publikasi lainnya seperti portal berita online atau koran Tempo. Pada akhirnya penelitian ini memiliki implikasi untuk memberikan literasi pembaca terkait dengan kajian media.

## 3. Kerangka Teori

Teori Agenda Setting menjelaskan bahwa media tidak mengatakan apa yang orang-orang pikirkan, tetapi media mengatakan apa yang harus orang pikirkan diantara banyaknya fenomena yang ada (Baran and Davis, 2012, p. 346). Media menentukan fenomena apa yang diangkat menjadi perbincangan publik. Mengacu pada teori tersebut, Tempo berusaha menjadikan kasus Harun Masiku mempengaruhi agenda publik. Kurt Lang dan Gladys Engel Lang (dalam Aminuddin, 2017, p. 166) menyatakan bahwa media memperlihatkan sesuatu

yang ingin dipertimbangkan, diketahui, dan dirasakan publik. Tempo diasumsikan memperlihatkan kasus Harun Masiku dengan sudut pandangnya dan ingin masyarakat mempertimbangkan suatu fenomena tersebut melalui pemberitaan yang dipublikasikan. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Bernard Cohen (dalam Baran & Davis, 2012, p. 347) yang menyatakan pers lebih dari sekedar *provider* opini dan informasi. Media berpotensi besar mengarahkan individu terkait yang seharusnya mereka pikirkan. Dunia bisa dipandang berbeda dengan orang yang berbeda. Bukan hanya keterkaitan dengan peminatan secara pribadi, namun juga peta pemikiran dari media yang terdiri dari penulis, editor, dan penerbit dari media yang mereka konsumsi.

Mengacu pada asumsi teori Agenda Setting, Tempo memilih isu terlebih dahulu yang ditempatkan dilaporan utama serta menjadi tema edisi majalahnya. Berita tersebut dibuat untuk menarik perhatian lebih dengan tekanan tertentu yang merujuk pada pejabat yang memiliki kepentingan, opini publik, dan suatu fenomena yang ada secara nyata (McQuail, 2011, p. 279). Shoemaker dan Reese (dalam Adriany, 2018, p. 727) menjelaskan pada tingkatan rutinitas media ada beberapa tahap, yang pertama berita disusun berdasarkan apa yang menarik bagi audiensnya. Kedua, organisasi media adalah pihak yang memproses informasi sedemikian rupa, dan juga menempatkan standar sistem yang digunakan oleh suatu media. Ketiga, terdapat pengaruh media dengan struktur yang ada didalamnya. Keempat, faktor-faktor di luar media juga mempengaruhi isi media. Kelima, adalah level ideologi.

Pada dasarnya media memuat ideologi, wacana, nilai yang dianut, norma yang disepakati dan juga keyakinan diseminasi yang ditujukan kepada masyarakat. Ideologi biasanya tidak nampak secara eksplisit dan halus, tetapi secara tidak sadar ideologi bisa mengubah pandangan individu secara tidak sadar. Realitas media berkaitan dengan logika media. Media mengkonstruksi realitas dan menseleksinya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan bias dalam realitas (Gora and Irwanto, 2015, pp. 38–40). Dalam hal ini bisa jelas menyatakan



media bukanlah pihak yang netral. Hal ini memberikan arti bahwa media membingkai realitas secara subjektif. Hal tersebut tentu bukan menjadi masalah selama argumentasi dan pembahasannya bisa dipertanggung jawabkan. McCombs menjelaskan bahwa Agenda Setting memiliki 2 tahap yaitu tahap objek dan tahap atribut. Tahap objek, media bisa mempengaruhi prioritas yang diberikan pada objek seperti isu, peristiwa, dan permasalahan. Dengan kata lain, media menggiring apa yang harus kita pikirkan. Pada level atribut media menggiring pada seleksi objek mana yang penting dan yang tidak penting (Baran and Davis, 2012, p. 350). Pandangan teori ini jelas merujuk pada pesan media secara subjektif mengatur pemberitaan Harun Masiku.

#### 4. Metode Penelitian

Studi pemingkai media mengenai pemberitaan kasus korupsi dan kolusi ini merupakan kajian teks dalam lingkup komunikasi massa. Paradigma konstruktivis dipilih sebagai pijakan filosofis yang berarti kebenaran objektif dan hal yang dimaknai pengetahuan merupakan hasil dari suatu sudut pandang (Denzin & Lincoln, 2009, p. 156). Penelitian ini mendeskripsikan sikap majalah Tempo dalam pemingkai kasus dugaan kolusi Harun Masiku. Data primer dalam penelitian ini adalah pemberitaan majalah Tempo edisi 20-26 Januari 2020 terkait kasus yang menimpa Harun Masiku. Terdapat 3 berita mendalam, 1 laporan yang merupakan penjabaran kronologis dari kasus Harun Masiku, dan 2 laporan wawancara Tempo dengan juru bicara KPK dan kordinator tim hukum PDIP yang relevan dalam edisi tersebut. Edisi tersebut dipilih karena fokus pada kasus yang menimpa Harun Masiku sebagai laporan utama dibanding dengan edisi lainnya. Berita tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis framing Robert N Entman untuk menggambarkan proses seleksi dan realitas media (Eriyanto, 2011, p. 220). Analisis *Framing* memungkinkan untuk melihat cara majalah Tempo memaknai, memahami dan membingkai suatu kasus yang diberitakan (Eriyanto, 2011, p. 10). Dalam analisisnya, berita dari majalah Tempo

akan kaji secara konstruktif mulai dari *define problem, diagnose causes, moral judgement, dan treatment recommendation*. Enam artikel tersebut akan dianalisis dengan setiap elemen *framing* sehingga bisa ditarik kesimpulan mengenai sikap majalah Tempo terkait kasus korupsi dan kolusi Harun Masiku.

Masing-masing pemberitaan dianalisis untuk menemukan keempat elemen *framing* Entman untuk melihat realitas yang ditonjolkan oleh majalah Tempo. Elemen *define problem* melihat bagaimana kasus yang menimpa Harun Masiku dipahami oleh wartawan. Elemen *diagnose causes* mengidentifikasi sebab masalah, baik orang maupun hal yang menyebabkan masalah dalam kasus Harun Masiku. Elemen *diagnose causes* melihat siapa yang dipandang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban. Elemen *moral judgement* atau *make moral judgement* menganalisis arahan moral atas suatu tindakan kasus tersebut terkait yang dilakukan pelaku. Terakhir elemen *treatment recommendation* adalah jalan yang ditawarkan majalah Tempo untuk menyelesaikan kasus Harun Masiku. Data sekunder penelitian ini didapat dari jurnal, buku, ataupun hal yang relevan terkait dengan penelitian ini.

##### 5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Majalah Tempo edisi 20-26 Januari 2020 mempublikasikan 6 laporan terkait kasus dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menyangkut Harun Masiku. Tiga diantaranya merupakan laporan pemberitaan mendalam berjudul "Harun di Pelupuk Mata Tak Tampak", "Anak Hakim di Kantor Sekjen", "Amuk Banteng Selepas di Sergap". Satu laporan kronologis dan *statement* pihak yang terkait dengan judul "Cupu Memburu Masiku". Dua artikel pemberitaan lainnya adalah artikel berupa laporan yang memuat wawancara tim Tempo dengan Ali Fikri selaku juru bicara KPK dengan judul "Belum Ada Catatan Harun Kembali" dan laporan wawancara dengan I Wayan Sudirta selaku kordinator tim hukum PDIP dengan judul "Kami Babak Belur". Keenam artikel tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain yang dikemas menjadi

laporan utama pada majalah Tempo edisi 20-26 Januari 2020 dengan tema "Cicak Jadi Buaya".

*Define problem.* Majalah Tempo mengidentifikasi kasus Harun Masiku sebagai masalah kekuasaan. Hal yang berhubungan dengan kasus kolusi Harun Masiku lebih dikaitkan dengan aspek kekuasaan dari pada aspek hukum. Tempo mengaitkan kasus tersebut dengan beberapa individu, kelompok dan intitusi penting di Indonesia yang dianggap mempunyai *power* sehingga pelaku digambarkan sulit untuk diselesaikan secara baik dan benar. Semua yang diduga terlibat disoroti Tempo sebagai suatu hal yang menguasai atau berhasil dikuasai. Dengan kata lain, Harun Masiku diduga mendapatkan perlindungan dari kekuasaan tersebut. Tempo juga menyoroti gerak kekuasaan dari pemerintah dalam peraturan yang dibuat secara kronologis.

Gambar 1. Laporan Utama Majalah Tempo 20-26 Januari 2020



Sumber : Majalah Tempo 20-26 Januari 2020

Tempo menyoroti keberadaan Harun Masiku yang belum diketahui, terutama kepergian dan kedatangan Harun Masiku dari Singapura. Judul berita pertama "Harun di Pelupuk Mata Tak Tampak". Teras berita di berita pertama ini menekankan kembali dengan kalimat yang menyatakan bahwa KPK justru menutupi keberadaan Harun Masiku dan menyebut yang bersangkutan berada di luar negeri sebelum adanya tindakan operasi tangkap tangan. Hal itu berarti Tempo menyoroti ada tindakan ketidak beresan terhadap kerja KPK yang

seharusnya efektif memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) namun melakukan tindakan bertahan untuk melindungi pelaku. Meskipun Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan KPK dan ditetapkan sebagai buron pada 8 Januari 2020. Lolosnya Harun Masiku juga tidak lepas dari bingkai strategi kelompok yang mempunyai kuasa untuk membiarkan Harun Masiku lolos dalam operasi tangkap tangan. Hal itu diperjelas dari pengutipan pernyataan Ali Fikri sebagai juru bicara KPK yang menyatakan "*informasi dari humas Imigrasi kan sudah jelas, berdasarkan data lintas orang, dia ada di dingapura per 6 Januari*". Pernyataan tersebut bertolak belakang dari penemuan data tim Tempo bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 bahwa Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia.

Penarikan berita kepada masalah kekuasaan pada berita pertama ini terlihat dari beberapa pernyataan yang mendukung. Pernyataan yang ditemui seperti "*Penyidik KPK Yang Terlibat Dalam Operasi Tangkap Tangan Malah Dicotot*", "*Saat Hendak Menyegel Ruang Kerja Hasto Krisyanto, Tim Penindak KPK Dihalangi Petugas Di Markas Partai Banteng*", "*Penyidik Tidak Lagi Melihat Harun Setelah Dia Masuk Ke Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)*". Tempo juga membandingkan pengajuan izin penggeledahan dan penyitaan KPK dari mekanisme lama ke mekanisme perizinan yang baru. Peraturan tersebut tidak terlepas dari pemerintahan Jokowi dan partai PDIP sebagai partai pemenang pemilu.

Gambar 2. Laporan Majalah Tempo 20-26 Januari 2020



Sumber : Majalah Tempo 20-26 Januari 2020

Artikel Tempo berikutnya dengan judul "Amuk Banteng Selepas Disergap" menempatkan kasus tersebut berkaitan dengan permasalahan kekuasaan. Di teras berita, Tempo sudah mengambil sudut pandang adu kekuasaan dimana PDIP melakukan serangan balik terhadap operasi tangkap tangan KPK terkait dengan keabsahan tim penindak. KPK yang mempunyai *power* yang dihadapkan dengan PDIP sebagai partai besar pemenang pemilu yang juga memiliki *power*. Tempo berfokus pada penghimpunan pengacara oleh PDIP pada lingkup internal partai dalam rangka membuat tim khusus penanganan citra PDIP. Tim tersebut menggandeng sejumlah nama besar seperti I Wayan Sudarta yang merupakan anggota DPR sebagai pimpinan tim, Yanuar Wasesa, Teguh Samudra dan Roy Jansen Siagian sebagai anggota. Kekuasaan saling berkoalisi membentuk kekuasaan yang lebih besar dalam kasus Harun Masiku yang merambat keberbagai institusi dan individu yang memiliki jabatan.

Majalah Tempo edisi 20-26 Januari 2020 membuat tempat khusus untuk mempublikasikan wawancara terkait 2 tokoh dari kelompok yang sepertinya bersebrangan, yaitu Juru bicara KPK, Ali Fikri dan Kordinator Tim Hukum PDIP, I Wayan Sudarta. Kedua tokoh yang memiliki kuasa di institusinya masing-masing dengan tujuan yang berbeda. Dalam wawancaranya bersama Ali Fikri Tempo menyoroti kegagalan KPK terkait penyegelan ruangan Sekertaris Jendral PDIP Hasto Krisyanto. Itu menunjukkan pertarungan kuasa antara tim KPK dan Hasto yang menyandang jabatan Sekertaris Jendral serta penaungan PDIP sebagai tameng pelindung.

*Diagnose causes.* Tempo tidak hanya melihat kasus tersebut hanya dari suap yang dilakukan Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan, namun Tempo melihat secara luas dari anggota intitusi-institusi dan partai pemenang pemilu yang terlibat. Pemberitaan Tempo menempatkan KPK sebagai korban dari kekuasaan PDIP dalam perluasan kekuasaan. Secara garis besar, PDIP diposisikan sebagai aktor atau penyebab masalah dari rumitnya permasalahan penanggulangan kasus KKN Harun Masiku. Secara menyeluruh, ada keterkaitan

berbagai institusi maupun individu yang ditempatkan sebagai pelaku yaitu Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, KPU, DPR, bagian keimigrasian, Dewan Pengawas KPK, bahkan sampai keterkaitan presiden, serta beberapa individu di KPK itu sendiri. Dengan diposisikan PDIP dan serangkaian individu serta institusi tersebut sebagai sumber permasalahan, pemberitaan Tempo menempatkan KPK secara institusi sebagai korban. KPK secara institusi dilemahkan secara sistematis oleh beberapa nama yang berperan dalam PDIP dan kerjasamanya dengan berbagai pihak. Secara lebih rinci, aktor penyebab masalah yang menyangkut PDIP adalah Harun Masiku, Hasto Krisyanto, Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, Agustini Tio Fridelina Sitorus, Yasonna Hamonangan Laoly, Nurhasan, serta tim hukum PDIP yang terdiri dari I Wayan Sudirta, Yanuar Wasesa, Teguh Samudera, dan Roy Jensen Siagian. Dari Kepolisian adalah Argo Yuwono, dari Dewan Pengawas KPK adalah Tumpak Hatorangan Pangabean, dari bagian humas dan protokol imigrasi adalah Arvin Gumilang, dari KPU adalah Wahyu Setiawan, dan dari KPK itu sendiri adalah pimpinan KPK Firli Bahuri dan juru bicara KPK sebagai penyambung pesan pimpinan yaitu Ali Fikri. Kepala lingkungan perumahan Bajeng Permai yaitu Sitakka juga ikut menjadi pelaku yang diduga menyembunyikan keberadaan Harun Masiku. Tempo menempatkan KPK sebagai pihak yang diserang berbagai kekuatan dari pemerintahan, institusi yang terlibat, serta PDIP sebagai pelaku serangan.

Tempo menempatkan presiden Joko Widodo dan DPR sebagai sumber masalah secara mendasar. Revisi Undang-Undang terkait KPK dianggap sebagai pelemahan institusi KPK yang menjadi tidak berdaya setelah adanya undang-undang tersebut. Mekanisme baru dalam pengajuan izin penggeledahan dirasa menyulitkan karena terdapat 5 tahap yang didalamnya melibatkan institusi diluar KPK. Sedangkan mekanisme lama hanya terdapat 2 tahap sederhana di internal KPK sehingga dinilai lebih efisien. Kehadiran Dewan Pengawas KPK juga disorot, hal ini justru memperburuk gerak KPK. Pelemahan tersebut merupakan inti dari permasalahan yang menyangkut kasus Harun. Praktek suap yang dilakukan

Harun Masiku yang ingin menjadi anggota DPR melalui pergantian antarwaktu dengan Wahyu Setiawan yang merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum merupakan masalah permukaan yang ditampilkan Tempo.

Tempo menyoroti pernyataan KPK yang meyakinkan publik bahwa Harun Masiku masih di Singapura saat operasi tangkap tangan. Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari Menteri Hukum dan HAM yang merupakan politisi PDIP Yasonna Hamonangan Laoly. Dalam hal ini Yasonna juga terlibat dalam aktor pelaku yang menyebabkan masalah ini semakin sulit. Tempo juga menyorot pernyataan Yasonna "*pokoknya belum di Indonesia*" yang merupakan pernyataan bersikukuh. Ali Fikri sebagai juru bicara KPK secara langsung maupun tidak langsung dibingkai sebagai pembuat masalah dengan ikut menutupi keberadaan Harun Masiku dibawah pengaruh pimpinannya.

Hasto dibawah naungan PDIP juga terlihat sebagai pelaku ketika tim KPK dihalangi petugas di markas PDIP saat hendak menyegel ruang Hasto. Hal ini menunjukkan bahwa PDIP bisa mempersulit proses pemeriksaan dari KPK. Akhirnya KPK gagal dalam penyegelan ruang kerja Hasto. Dengan kata lain, kegagalan institusi KPK merupakan korban dari kekuasaan PDIP. Tempo menyoroti keinginan Harun untuk menjadi anggota DPR tidak lepas dari dukungan PDIP. Hal tersebut bisa dilihat dari pemberitaan Tempo yang menyatakan bahwa "*PDIP Ngotot Memperjuangkan Harun Untuk Mendapatkan Kursi Di DPR*". Dukungan PDIP tersebut menjadi masalah yang menjalar keberbagai tindakan yang dilakukan pada pelaku. Harun Masiku diposisikan hanya sebagai satu pintu masuk dari struktur strategi yang dimainkan oleh pelaku lain didalam partai pemenang dan institusi-institusi yang mendukungnya.

Kepolisian juga disoroti sebagai pihak yang terlibat dalam pembuatan masalah di kasus Harun. Dalam hal ini Tempo menyoroti dengan pernyataan "*lima anggota satuan tugas penindakan yang membuntuti Harun ditahan sejumlah polisi*". KPK dinyatakan gagal dalam menyelidiki keberadaan Harun yang ada di PTIK. Tempo juga menyorot bahwa "*penyidik tidak lagi melihat Harun*

setelah dia masuk ke kompleks PTIK". Posisi tim penyidik KPK sebagai korban diperkuat dengan pernyataan "*penyidik KPK yang terlibat dalam operasi tangkap tangan malah dicopot*".

Tempo menyoroti PDIP yang menobatkan diri sebagai korban terhadap pemberitaan terkait operasi tangkap tangan KPK. Tempo memposisikan PDIP secara konsisten sebagai pelaku pembuat masalah. Institusi KPK yang terwakilkan oleh tim penindak diposisikan secara konsisten sebagai korban oleh serangan balik PDIP. Posisi tersebut bisa dilihat pada pernyataan diantaranya Muqdir menyerang KPK dengan mengklaim surat penyidikan tidak sah, tim hukum PDIP juga mengadukan penindakan KPK kepada dewan pengawas sebagai kesalahan KPK. Hal itu juga terlihat dari pernyataan "*dari parlemen politikus partai banteng juga ikut menyerang KPK*".

Usaha PDIP untuk memposisikan dirinya menjadi korban juga dimuat dalam pemberitaan Tempo. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan Sudirta yang termuat "*Sudirta merasa partainya dipojokkan oleh pemberitaan di media massa dan kurang diberi ruang klarifikasi*". Pernyataan itu berlanjut menasar media yang menyatakan media tidak bekerja sesuai kode etik jurnalistik. Tim hukum PDIP juga diberitakan merangkul beberapa pihak seperti KPU dengan menggelar pertemuan tertutup terkait permasalahan suap Harun Masiku, KPK, Dewan Pers, dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Penempatan posisi PDIP seperti itu disoroti Tempo tidak terlepas dari persiapan menghadapi hajatan politik dan pemilihan kepala daerah.

*Moral Judgement.* Penilaian atas Harun Masiku sebagai sumber masalah ini datang dari beberapa hal, yaitu revisi Undang-Undang terkait KPK oleh presiden dan DPR dan kekuasaan yang berjejing dari PDIP. PDIP membentuk tim khusus penanganan hukum yang diungkapkan untuk memeriksa cacat prosedur. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan I Wayan Sudairta "*tim hukum tidak hanya memeriksa cacat prosedur yang dilakukan KPK, tapi juga melakukan tindakan hukum. Misal konsultasi ke dewan pengawas KPK, Dewan Pers, dan*



*Bareskrim Polri*". Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Tempo memperjelas ada kesempatan menyerang balik oleh pelaku dari sela atau kekurangan yang sengaja dibuat dalam mekanisme baru karena revisi Undang-Undang terkait KPK. Mekanisme tersebut dinilai tidak lebih efektif dari sebelumnya dan justru melemahkan posisi KPK. Presiden Jokowi dinilai keliru yang menilai pengutamaan penindakan KPK akan membuat pejabat takut mengambil keputusan. Jokowi dinilai salah dan seakan tidak ingin memiliki lembaga antikorupsi yang lincah dan terampil.

Institusi KPK dengan perwakilan tim penindakan sebagai korban dan Pimpinan KPK sebagai pelaku. Tempo menyoroti hal tersebut sebagai ketidakseriusan KPK dalam penanganan kasus Harun Masiku. KPK sudah tidak berdaya setelah munculnya revisi Undang-Undang terkait dengan aturan KPK. Munculnya Dewan Pengawas dan perpanjangan prosedur izin penggeledahan menjadikan KPK tidak bisa bekerja dengan efisien atau lebih buruk dari sebelumnya. Dewan pengawas dinilai memiliki kuasa yang lebih tinggi dari pada pimpinan KPK. Tempo melihat, tidak ada kejujuran dari instansi dan partai yang terlibat dalam pencarian Harun. Tempo meyakini bahwa Harun ada di Indonesia saat operasi tangkap tangan tersebut. Harun hanya pergi selama 1 hari dari tanggal 6 sampai 7 Januari 2020. Namun instansi terkait yaitu KPK, keimigrasian, bahkan menteri Hukum dan HAM mengelak keberadaan Harun yang telah di Indonesia pada saat itu. Dalam hal ini, kasus tersebut menjadi suatu drama yang sebenarnya penuh dengan kepura-puraan dan ketertutupan.

KPK secara garis besar dinilai tidak serius dalam menangani kasus Harun Masiku karena beberapa individu didalamnya diduga terlibat dalam penyembunyian Harun. Tempo juga menilai ada kesimpangsiuran informasi pada Dewan Pengawas KPK melalui ketuanya Tumpak Hatorangan Panggabean dan melalui wakil ketuanya Nurul Ghufron. Hal tersebut bisa terlihat pada pernyataan *"wakil KPK mengklaim telah mengajukan permohonan izin, tapi ketua Dewan Pengawas mengatakan KPK belum mengajukan izin"*. Dari pernyataan tersebut

bisa terlihat lagi bahwa mekanisme penggeledahan dan penyitaan yang baru dinilai tidak efektif.

Begitu juga penilaian PDIP, secara garis besar PDIP dinilai sebagai partai pemenang yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memperluas wilayah kekuasaan. Kekuasaan tersebut memperkuat perlindungan pada Harun Masiku yang merupakan anggota dari partai itu. PDIP merupakan pengendali strategi dari penyembunyian Harun melalui anggota-anggotanya yang menjabat di pemerintahan. PDIP dinilai menganut sistem oligarki yang berdampak pada ketidak efektifan kerja pemerintah. Hal tersebut karena hampir di setiap institusi yang terlibat, ada politisi PDIP yang siap membantu anggota partainya yang lain. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan "*Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly ngotot menyatakan Harun masih diluar negeri*". "*Pokoknya belum ada di Indonesia*" kata politikus PDI Perjuangan. Tempo menyandingkan jabatan menteri dengan politisi yang artinya ada keterkaitan atau dukungan dari menteri terhadap penyembunyian Harun Masiku yang berada dibawah naungan partai yang sama. Hal tersebut tergambar dalam kalimat "*berbagai manuver menjadi pergunjingan di lingkungan internal PDIP... Mereka menilai ada upaya menutupi keterkaitan Sekertaris Jendral Hasto Kritiyanto dengan para tersangka*".

Pemberitaan Tempo juga menyoroti pemaknaan yang berbeda dari tindakan penangkapan tim penyidik KPK oleh kepolisian saat mengikuti Harun Masiku. Juru bicara dan Wakil ketua KPK memaknai penangkapan tersebut adalah kesalah pahaman, sedangkan Kepala Biro Penerangan Umum Kepolisian RI memaknai hal tersebut merupakan kewajaran terkait penangkapan orang asing yang masuk ke dalam lingkungannya. Lebih jauh lagi, Kepolisian disoroti sebagai pihak yang membantu Harun Masiku lolos dari KPK. Hal lain yang disorot adalah pimpinan KPK mengganti tim penyidik lama dengan penyidik baru dari kepolisian. Hal tersebut dinilai berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Hal tersebut menekankan kembali tentang sistem oligarki untuk mempermudah kerjasama

menyembunyikan Harun untuk tujuan tertentu suatu golongan. Pesan moral juga terlihat dari tema rubrik laporan utama pemberitaan ini yaitu "*cicak jadi buaya*". Hal itu tidak terlepas dari kejadian *cicak versus buaya* pada tahun 2009 dimana KPK diibaratkan cicak dan kepolisian diibaratkan buaya. Penilaian pada KPK di kasus Harun di 2020 ini berubah. Cicak yang tadinya dimaksudkan KPK melawan buaya yang dimaksudkan kepolisian terkait kasus korupsi, di kasus ini KPK malah berkomplotan dengan kepolisian dengan dugaan ikut menyembunyikan Harun.

PDIP tidak merasa bersalah ataupun terlihat serius dalam penanganan Harun Masiku yang merupakan anggota dari partainya. Tempo menilai ada ketertutupan yang berkaitan dengan keuntungan anggota dan instansi pendukung PDIP terkait kasus Harun Masiku. Tempo menilai PDIP *ngotot* untuk menjadikan Harun sebagai anggota DPR tapi enggan untuk memberikan alasan. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Ketua PDIP Ahmad Basarah "*rahasia dapur, yang mengatur konteks ini ya sekretaris jendral partai*". Sekretaris Jendral partai dalam hal ini adalah Hasto yang lolos dari operasi KPK. Tempo menilai semua kekuasaan PDIP terstruktur dengan baik untuk menutupi strategi yang mengarah pada keuntungan golongan. Dalam hal ini Harun Masiku yang masih di sembunyikan keberadaannya. Tempo juga menyoroti penilaian PDIP terkait pemberitaan operasi tangkap tangam KPK. Tim khusus hukum PDIP Teguh Samudera menilai perkara Hasto hanyalah penipuan dan pemerasan. Harun memang aktor dalam penyebab masalah ini, tetapi Harun hanyalah salah satu aktor yang muncul dipermukaan dari rangkaian kekuasaan lain yang tidak bisa ditembus oleh KPK sebagai pihak pemberantas KKN.

Penilaian moral kepada PDIP, kepolisian, pimpinan KPK dan beberapa instansi maupun individu yang terlibat adalah penekanan bahwa tindakan tersebut tidak pantas dilakukan. PDIP yang anggotanya terkena kasus KKN, tanpa malu dan ragu membentuk tim hukum khusus untuk penanganan citra demi suksesnya golongan partai pemenang tersebut dalam hajatan politik pemilihan kepala daerah. Tim hukum PDIP juga disorot mengancam tim penyidik yang

dianggap tidak sesuai prosedur dalam upaya penyegelan ruang kerja Hasto. Hal itu bisa terlihat dari pernyataan I Wayan Sudarta dalam wawancanya dengan wartawan Tempo. “kami melaporkan satu bundel berkas pemberitaan media. Kalau memenuhi unsur pidana, kami akan melaporkannya ke pimpinan pusat untuk dibahas lebih lanjut”. Kepolisian yang menangkap tim KPK dalam penyidikan Harun diduga menghambat tugas KPK dalam penanganan kasus tersebut. Setelah itu tim penyidik KPK diganti dengan penyidik dari satuan kepolisian yang diduga kepolisian juga sudah bekerja sama untuk menyembunyikan Harun. Ditambah lagi pergantian tim penyidik seperti itu berbeda dari kebiasaan KPK sebelumnya. Dari semua ini, bisa dilihat ada strategi yang sistematis untuk menutupi keberadaan Harun serta orang-orang yang terlibat didalamnya secara lebih luas.

*Treatment recommendation.* Secara tidak langsung, Tempo merekomendasikan agar kasus Harun Masiku ini diusut tuntas sampai pada akhirnya. Pengusutan tersebut termasuk siapa dan institusi apa yang terlibat didalamnya tanpa pandang bulu. Tempo merekomendasikan pemerintah manajamkan kembali fungsi KPK dengan dengan kembali pada mekanisme lama. Hal tersebut dikarenakan mekanisme pengeledahan dan penyitaan yang baru tidak lebih efektif daripada mekanisme lama. Mekanisme baru hanya membuat celah para pemangku jabatan untuk mengambil keuntungan dari kebijakan baru tersebut. Tempo juga merekomendasikan agar semua pihak terbuka serius dalam penanganan kasus Harun Masiku secara khusus dan kasus KKN lainnya secara umum. Penindakan hukum juga perlu dilakukan pada individu yang terlibat. Tidak ada lagi yang kebal hukum karena kekuasaan.

Tabel 1. *Frame* Pemberitaan Harun Masiku pada Majalah Tempo

Elemen	Keterangan
<i>Define problem</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masalah kekuasaan</li><li>• Harun Masiku belum tertangkap karena mendapat perlindungan dari kekuasaan PDI-P dan juga pemerintah.</li><li>• KPK menutupi keberadaan Harun Masiku.</li><li>• PDIP melakukan serangan balik terhadap operasi</li></ul>

	tangkap tangan KPK terkait dengan keabsahan tim penindak.
<i>Diagnose causes</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDI-P dan pemerintah diposisikan sebagai pelaku dan KPK diposisikan sebagai korban.</li> <li>• Presiden Joko Widodo dan DPR diposisikan sebagai sumber masalah mendasar karena revisi Undang-Undang yang disorot sebagai pelemahan KPK.</li> <li>• Hasto Krisyanto dibawah naungan PDIP disorot sebagai pelaku ketika tim KPK dihalangi petugas di markas PDIP saat hendak menyegel ruang Hasto.</li> <li>• Kepolisian disoroti sebagai aktor pembuat masalah yang menghalangi penangkapan Harun Masiku.</li> </ul>
<i>Moral judgement</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPK merupakan institusi yang tidak berdaya yang dilemahkan secara sistematis.</li> <li>• KPK tidak serius dalam penanganan kasus Harun Masiku setelah terjadi revisi Undang-Undang yang menyangkut KPK.</li> <li>• Presiden Jokowi keliru dalam persetujuannya terkait revisi Undang-Undang yang berkenaan dengan KPK.</li> </ul>
<i>Treatment recommendation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembalikan fungsi KPK dengan mekanisme lama.</li> <li>• Mengusut tuntas kasus Harun Masiku.</li> <li>• Transparansi semua pihak dalam penanganan kasus Harun Masiku.</li> </ul>

Tahap objek dalam teori Agenda Setting menjelaskan bahwa majalah Tempo menyoroti yang seharusnya dipikirkan adalah kasus Harun Masiku terkait keberadaannya yang menjadi polemik. Tahap objek juga menggiring pembaca cara bagaimana memikirkannya, yaitu dengan mekanisme kekuasaan yang terstruktur. Kasus Harun Masiku dilihat dari mekanisme kuasa dari level presiden, PDIP, DPR, hingga institusi yang terkait yang diduga tidak hanya ikut membantu Harun Masiku sebagai salah satu aktor, namun juga membantu suatu golongan secara luas. Peristiwa ini dilihat dari sistem oligarki yang digunakan untuk mencapai kekuasaan yang lebih luas dari partai dan institusi yang terkait. Tempo juga tidak bisa lepas dari ideologinya dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dirasa penting untuk diketahui masyarakat. McLuhan memaknai media sebagai perpanjangan indera manusia (Baran and Davis, 2012, p. 273). Manusia dalam hal ini adalah media Tempo itu sendiri. Dengan kata lain, Tempo berusaha membuat opini publik berdasarkan sudut pandangnya bahwa

kasus ini tidak bisa terlepas dari kekuasaan dan kekuasaanlah yang menentukan kebenaran dari kasus ini.

## 6. Simpulan

Media Tempo cenderung pesimis tentang keputusan pemerintah dan pengaturan Undang-Undang terkait anti korupsi di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini adalah elit dari berbagai lapisan, termasuk presiden dan DPR. Tempo cenderung menyikapi pemerintah membuka celah bagi para pelaku KKN untuk melakukan aksinya. Dengan kata lain, pemerintah tidak serius dalam memberantas KKN di Indonesia. Tempo melihat kasus Harun Masiku fokus pada kekuasaan dan ekspansi kekuasaan yang akhirnya menuntun pembaca untuk melihat dari berbagai pihak yang terkait dan berkuasa. Dengan begitu, Tempo menggiring opini publik dengan menyampaikan kronologis kejadian dari pantauannya terkait dengan kekuasaan-kekuasaan yang bertarung didalamnya melalui majalah. Pemberitaan di media Tempo cenderung menyoroti kekuasaan PDIP terkait partai besar pemenang pemilu yang mengubah sistem KPK sehingga dirasa melemahkan institusi tersebut.

Kuasa PDIP masuk dalam beberapa wilayah kekuasaan termasuk KPK hingga KPK terkontaminasi dan akhirnya terjadi pelemahan institusi. Tempo menyikapi bahwa KPK yang seharusnya netral dan mempunyai wewenang terkait kasus KKN, menjadi kurang berdaya karena kekuasaan PDIP ada dimana-mana. Tempo menyikapi kasus Harun Masiku sebagai kasus kekuasaan yang terstruktur dengan melibatkan banyak pihak. Harun Masiku hanyalah salah satu aktor dalam kasus tersebut. KPK dinilai tidak memiliki keberanian untuk melawan kekuasaan besar yang mengelilingi Harun Masiku dan menyingkap jaringan yang ada di belakangnya. Pada akhirnya, Tempo menyuarakan agar kasus Harun Masiku dapat diselesaikan dengan tuntas, termasuk keterlibatan individu atau institusi yang ada didalamnya. Undang-Undang No.19 tahun 2019 yang menyangkut KPK juga dirasa perlu dikaji ulang. Hal tersebut karena UU tersebut membuat celah

yang bisa digunakan untuk keuntungan golongan dan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adriany, F. G. (2018) 'Konstruksi Berita Layanan Publik dalam Program "Sumut dalam Berita" TVRI Sulawesi Utara', *Jurnal Aspikom*, 3(4), pp. 722–736.
- Aji, R. M. (2020) *MAKI Yakin Ada Bohir Suap Rp. 900Juta di Kasus Harun Masiku*, *Tempo.co*. Available at: <https://nasional.tempo.co/read/1307398/maki-yakin-ada-bohir-suap-rp-900-juta-di-kasus-harun-masiku> (Accessed: 8 March 2020).
- Aminuddin, A. T. (2017) 'Instagram : Bingkai Kasus Agama di Media Sosial', *The Messenger*, 9(2), pp. 163–175.
- Ananda, M. F. S., Sumartias, S. and Nugraha, A. R. (2019) 'Analisis Framing Pemberitaan Korupsi Massal di Media Online Detik.com', *Jurnal Studi Komunikasi*, 3(2), pp. 253–271.
- Baran, S. J. and Davis, D. K. (2012) *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. Boston: Wadsworth.
- Eriyanto (2011) *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Garnesia, I. (2019) *Kasus Korupsi : 2018 Terbanyak, Anggota DPR & DPRD Paling Korup*, *Tirto.id*.
- Gora, R. and Irwanto (2015) *Hukum, Etika, dan Kebijakan Media : Regulasi, Praktik, dan Teori*. Yogyakarta: Deepublisher.
- Hariyanto, I. (2020) *Anggota DPR Riezky Tak Tahu Soal PAW Harun Masiku : Suara Saya Tinggi*, *Detik.com*. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-4889958/anggota-dpr-riezky-tak-tahu-soal-paw-harun-masiku-suara-saya-tertinggi> (Accessed: 25 February 2020).
- Jaya, D. E. and Syam, H. (2019) 'Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi E-KTP Oleh Setya Novanto di Cnnindonesia.com dan Viva.co.id', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(3), pp. 1–14.
- KPK (2019) *Laporan Tahunan KPK 2018*. Jakarta.
- Lim, M. (2014) 'Klik yang Tak Memantik : Aktivisme Media Sosial di Indonesia', *Komunikasi Indonesia*, 3(1), pp. 35–49.
- Marlia and Saifullah, A. R. (2020) 'Referensi Cover Majalah Tempo Edisi 14 September', *Semantik*, 9(1), pp. 11–16.
- McQuail, D. (2011) *Teori Komunikasi Massa*. Edisi 6 Bu. Jakarta: Salemba Humanika.
- Musman, A. and Mulyadi, N. (2017) *Jurnalisme Dasar : Panduan Praktis Para Jurnalis*. Yogyakarta: Komunika.
- Ramadhan, A. (2020) *Kasus Suap Harun Masiku, KPK Periksa Komisioner KPUD Sumsel*, *Kompas.com*. Available at:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/29/10310471/kasus-suap-harun-masiku-kpk-periksa-komisioner-kpud-sumsel> (Accessed: 25 February 2020).

Ryn (2020) *Ketua KPU Diperiksa KPK Terkait Suap Harun Masiku*, *Cnnindonesia.com*. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200128104515-12-469316/ketua-kpu-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-harun-masiku> (Accessed: 24 February 2020).

Tempo (2019) *Selamat Datang, KPK Jokowi*, *Tempo.co*. Available at: <https://kolom.tempo.co/read/1287822/selamat-datang-kpk-jokowi/full&view=ok> (Accessed: 10 March 2020).

Tempo (2020) *Tim Pencari Fakta Harun Masiku Sepi Peminat*, *Tempo.co*. Available at: <https://majalah.tempo.co/read/nasional/159585/penolakan-sejumlah-lembaga-negara-terhadap-tpf-harun-masiku> (Accessed: 8 March 2020).

Trianita, L. *et al.* (2020) 'Harun di Pelupuk Mata Tak Tampak', *Tempo*.

Zaenudin, A. (2019) *Rating Satu Bintang : Ketika Aplikasi Tempo Tumbang Karena Netizen*, *Tirto.id*. Available at: <https://tirto.id/rating-satu-bintang-ketika-aplikasi-tempo-tumbang-karena-netizen-eiE6> (Accessed: 8 March 2020).